



**ANALISIS KOMPARASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS  
PSAP 05 DAN PSAP 07 PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Usfi Afkarina Fitri  
NIM 130810301029**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**ANALISIS KOMPARASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS  
PSAP 05 DAN PSAP 07 PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Usfi Afkarina Fitri**  
**130810301029**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan dan segalanya. Terimakasih atas rahmat dan kehendakMu-lah akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Orang tuaku tercinta, Bapak Riyadotul Mustofa dan Ibu Siti Mukorinah (alm);
3. Adikku Syahrul Arfani yang sangat aku sayangi;
4. Guru-guruku sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh kesabaran;
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang aku banggakan.

**MOTO**

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri”.

**(Qs. Al-Ankabut: 6)**

“Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”.

**(HR. Turmudzi)**

“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.”

**(Imam Syafi’i)**

Kalau aku susah, cukuplah kutangisi semalaman. Semalam suntuk. Esoknya aku tak mau lagi menangis. Aku bangun dan tegak kembali.

**(Andrea Hirata: Maryamah Karpov)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usfi Afkarina Fitri

NIM : 130810301029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PSAP 05 dan PSAP 07 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juni 2017

Yang menyatakan,

Usfi Afkarina Fitri

NIM 130810301029

**SKRIPSI**

**ANALISIS KOMPARASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS  
PSAP 05 DAN PSAP 07 PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Usfi Afkarina Fitri  
NIM 130810301029**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama  
Dosen Pembimbing Anggota**

**: Andriana, S.E, M.Sc, Ak.  
: Dr. M. Miqdad, SE, MM., Ak**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis  
PSAP 05 dan PSAP 07 Pada Dinas Perikanan Kabupaten  
Jember  
Nama Mahasiswa : Usfi Afkarina Fitri  
NIM : 130810301029  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 14 Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Andriana, S.E, M.,Sc  
NIP. 19820929 201012 2002

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak.  
NIP. 19710727 199512 1001

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi

Dr.Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak.  
NIP 19640809 199003 2001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS KOMPARASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS  
PSAP 05 DAN PSAP 07 PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Usfi Afkarina Fitri

NIM : 130810301029

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 Juli 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak (.....)  
NIP. 196001031991031001

Sekretaris : Drs. Sudarno, M.Si, Ak (.....)  
NIP. 196012231989021001

Anggota : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak (.....)  
NIP. 195911101989021001

**Usfi Afkarina Fitri**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif melalui proses wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Selanjutnya keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan metode triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember, PSAP 05 dan PSAP 07. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Jember mengakui aset biologis sebagai golongan aset tetap lain-lain sebesar harga perolehan dan melaporkannya pada neraca. Hasil temuan penelitian lainnya setelah membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAP 05 dan PSAP 07 menunjukkan beberapa perbedaan. PSAP 07 mengakui aset biologis sebagai aset tetap lain-lain sebesar harga perolehan dan melaporkannya pada neraca. PSAP 05 melaporkan aset biologis kedalam neraca sebagai golongan dari persediaan sebesar nilai wajar.

**Kata kunci** : Aset biologis, pengakuan, pengukuran, pengungkapan

**Usfi Afkarina Fitri**

*Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University*

## **ABSTRACT**

*This research is a descriptive research with qualitative approach, that is done by collecting, preparing, and analyzing data obtained descriptively through interview process, obeservasi, and documentation. Furthermore, the validity of data in this study was tested by triangulation method. This research aims to explain the difference of biological asset accounting treatment at Department Fisheries of Jember, PSAP 05 and PSAP 07. Based on the result of research, it can be concluded that Departement Fisheries of Jember recognizes biological assets as another class of fixed asset at acquisition cost and report on balance sheet . Other research findings after comparing the accounting treatment of biological assets based on PSAP 05 and PSAP 07 show some differences. PSAP 07 recognizes biological assets as other fixed assets at cost and reports them on the balance sheet. PSAP 05 reports biological assets to the balance sheet as a class of inventories at fair value.*

*Key Word : Biological assets, recognition, measurement, disclosure*

## RINGKASAN

**Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember;** Usfi Afkarina Fitri, 130810301029; 2017; 51 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam perkembangannya akuntansi telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya adalah akuntansi pemerintahan yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Tuntutan atas transparansi dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Dimana akuntan pemerintah wajib menyajikan setiap transaksi yang ada dalam laporan keuangan.

Tingginya peranan laporan keuangan dalam sebuah entitas membuat keberadaan laporan keuangan mutlak dibutuhkan, tentunya dengan kualitas informasi yang baik. Mengingat pentingnya fungsi dari laporan keuangan tersebut, maka entitas wajib menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar serta sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menghindari asimetri informasi dari pengguna laporan keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatannya entitas pemerintah membutuhkan sumberdaya ekonomi untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang. Dimana tujuan dari pemanfaatan sumberdaya ekonomi tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Entitas pemerintah seperti Dinas Perikanan memiliki dan mengelola aset biologis yang cenderung lebih rumit perlakuannya. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup yang mempunyai karakteristik unik karena mengalami perubahan pertumbuhan bahkan setelah aset biologis tersebut menghasilkan sebuah *output*. Perubahan dalam aset biologis terdiri dari proses pertumbuhan, penambahan, produksi, dan penghasilan yang menyebabkan terjadinya perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Aset biologis dapat menghasilkan aset

baru berupa produk agrikultur atau berupa tambahan aset biologis lainnya dalam tingkatan yang sama. Perubahan yang terjadi pada aset biologis memerlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar (Ridwan, 2011).

Entitas pemerintah yang mengelola aset berupa hewan dan tanaman juga wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan pengelolaan aset biologis dalam entitas pemerintah, SAP tidak memunculkan aturan yang spesifik yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pengelolaan aset biologis. Namun SAP menyajikan peraturan mengenai aset biologis dalam PSAP 07 aset tetap dan PSAP 05 persediaan. Kedua pernyataan standar akuntansi pemerintahan di atas dapat digunakan oleh entitas pelaporan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang andal.

Penelitian ini mengambil contoh dari laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang akan digunakan sebagai media untuk menjelaskan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAP 07 dan PSAP 05. Keberadaan aset biologis dalam Dinas Perikanan Kabupaten Jember ini menjadi sangat unik dan krusial karena termasuk kedalam kegiatan utama entitas. Kemudian permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara entitas melakukan proses pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian terhadap aset biologis tersebut. Hal ini dikarenakan aset biologis akan terus mengalami perubahan selama masa ekonomisnya. Dengan demikian apabila peneliti menemukan ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi aset biologis berdasar standar akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan standar akuntansi pemerintahan Internasional maka seharusnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai penilaian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menampilkan tabel yang menunjukkan perbedaan dari masing-masing standar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber

data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini diuraikan dalam bentuk narasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan setelah membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis yang selama ini telah diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember, PSAP 05 dan PSAP 07.



## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Komparasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PSAP 05 dan PSAP 07 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendak-Mu lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
3. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi;
5. Dr. Hj Siti Maria W., M.,Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Andriana, S.E, M.,Sc dan Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

8. Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, Bapak Edi Iswanto, Bapak Karsam Budi Siswoyo, Bapak Abdillah serta Ibu Diah Setyowati yang telah membantu saya dalam proses penelitian;
9. Kedua orang tuaku, bapak Riyadotul Mustofa yang selalu meberikan dukungan, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini, serta almarhumah ibunda tercinta Siti Mukorinah yang sampai saat ini tetap di hati, karena semangat dan pesan-pesannya beliauah yang menjadi motivasi terkuat untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Adikku Syahrul Arfani yang selalu menyemangati dan mendukungu dalam hal apapun;
11. Muhammad Ridwan yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya;
12. Keluarga keduaku selama di Jember Dini Rohmatul Hasanah, Estu Yuliani Nur Azizah, Qurotun Ainiyah dan Leviana Yogaswari Putri yang telah menemani selama menyelesaikan kuliah, dan selalu mendukungu selama kuliah. Terimakasih atas kenangan dan kebersamaan dari kalian. Semoga kebersamaan ini berlanjut hingga kita menua nanti;
13. Teman-teman Puri Asri, Husnun Nadiroh, Winarni Magdalena, Lina Ariani, dan Farah Iskandar terimakasih atas semangat, dukungan, dan keceriaan sampai saat ini. Semoga kita semua menjadi orang sukses;
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
15. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas jember;
16. Semua pihak yang membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 Juni 2017

Penulis

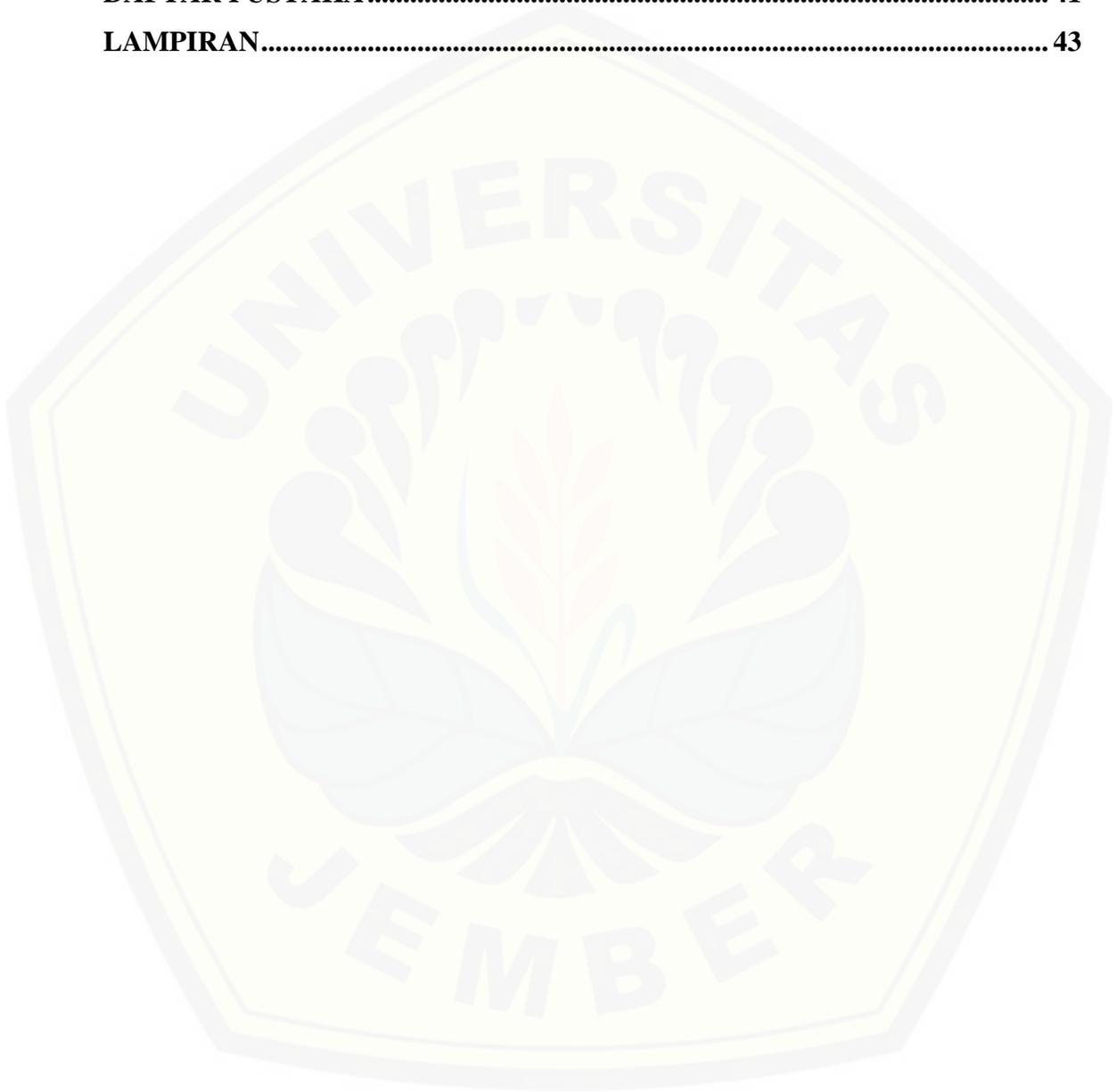


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan penelitian .....	5
1.4 Manfaat penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Laporan Keuangan .....	7
2.2 Neraca.....	8
2.3 Catatan atas Laporan Keuangan.....	9
2.4 Persediaan .....	11
2.4.1 Definisi Persediaan .....	11
2.4.2 Pengakuan Persediaan .....	12
2.4.3 Pengukuran dan Penilaian Persediaan.....	13

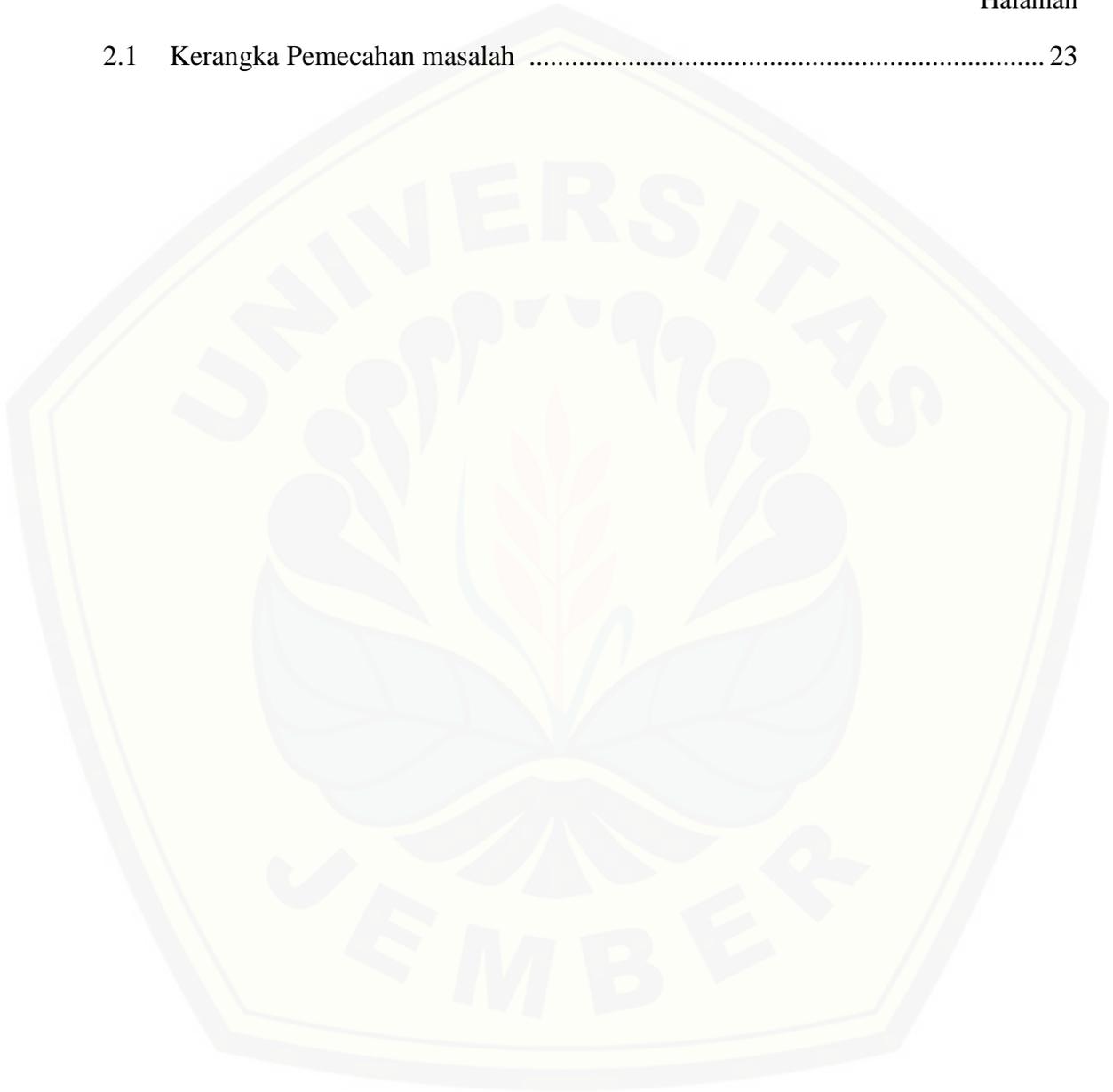
2.4.4	Penyajian dan Pengungkapan Persediaan .....	14
2.5	Aset .....	15
2.5.1	Definisi dan Karakteristik Aset.....	15
2.5.2	Klasifikasi Aset .....	16
2.5.3	Pengakuan Aset .....	17
2.5.4	Pengukuran dan Penilaian Aset.....	18
2.5.5	Penyajian dan Pengungkapan Aset .....	20
2.6	Penelitian Terdahulu .....	21
2.7	Kerangka Konseptual .....	22
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1	Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	24
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.3	Teknik Analisis Data.....	26
3.4	Uji Keabsahan Data .....	27
3.5	Lokasi Penelitian .....	28
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1	Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Jember .....	29
4.1.1	Sejarah Berdirinya Dinas Perikanan Kabupaten Jember .....	29
4.2	Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember .....	29
4.2.1	Pengakuan.....	30
4.2.2	Pengukuran dan Penilaian .....	31
4.2.3	Penyajian dan Pengungkapan.....	32
4.3	Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAP 05 dan PSAP 07.....	34
4.4	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis.....	35
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>39</b>
5.1	Kesimpulan .....	39

<b>5.2 Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>5.3 Saran.....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>



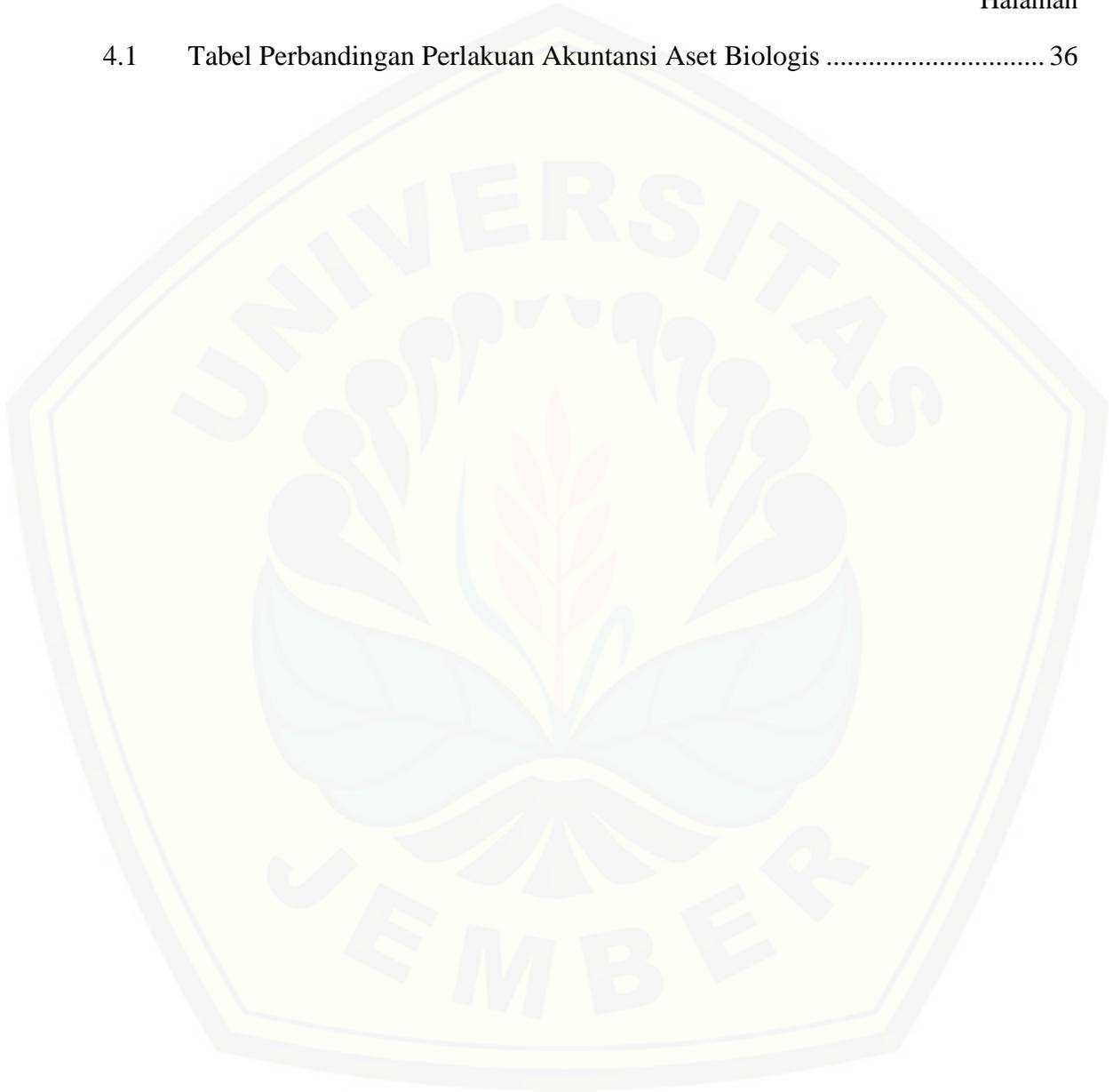
**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Pemecahan masalah .....	23



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
4.1 Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis .....	36



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	43
B. Hasil Wawancara .....	45
C. Laporan Hasil Produksi Balai Benih Ikan Rambigundam Tahun 2016.....	56
D. Laporan Mutasi Srock Indukan Di Balai Benih Ikan Rambigundam .....	57
E. Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Jember .....	58
F. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember .....	60
G. Contoh Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan IPSAS 27 Agriculture .....	67
H. Contoh Laporan Kinerja Keuangan Menurut IPSAS 27 Agriculture .....	68
I. Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Menurut IPSAS 27 Agriculture .....	69
J. Contoh Laporan Arus Kas Menurut IPSAS 27 Agriculture .....	70

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan sebuah proses untuk mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan yang tepat sebagai sarana untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non-keuangan (Alfasyiri, 2016). Dalam perkembangannya akuntansi telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya adalah akuntansi pemerintahan yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Tuntutan atas transparansi dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Dimana akuntan pemerintah wajib menyajikan setiap transaksi yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Agustini, 2011).

Tingginya peranan laporan keuangan dalam sebuah entitas membuat keberadaan laporan keuangan mutlak dibutuhkan, tentunya dengan kualitas informasi yang baik. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan lengkap. Kelengkapan laporan keuangan dalam entitas pemerintah dapat dilihat dari keberadaan tujuh laporan keuangan pokok seperti yang telah ditetapkan dalam PSAP No. 01 (2010:28) yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya fungsi dari laporan keuangan tersebut, maka entitas wajib menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar serta sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menghindari asimetri informasi dari pengguna laporan keuangan.

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang baik, maka entitas perlu memperhatikan pemilihan metode akuntansi yang digunakan. Perbedaan pemilihan metode akuntansi yang digunakan akan berakibat pada ketidaksesuaian dari hasil pengukuran masing-masing elemen dari laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2014). Perbedaan penggunaan metode akuntansi sangat mungkin terjadi khususnya pada entitas yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu yang dimaksudkan salah satunya adalah pada perlakuan aset yang dikelola (Ridwan, 2011).

Dalam melaksanakan kegiatannya entitas pemerintah membutuhkan sumberdaya ekonomi untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang. Dimana tujuan dari pemanfaatan sumberdaya ekonomi tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sumberdaya ekonomi yang dimaksud merupakan barang atau aset yang dimiliki dan dikelola oleh negara (Auliana, 2014). Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan definisi aset berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2010 adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Entitas pemerintah seperti Dinas Perikanan memiliki dan mengelola aset biologis yang cenderung lebih rumit perlakuannya. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup yang mempunyai karakteristik unik karena mengalami perubahan pertumbuhan bahkan setelah aset biologis tersebut menghasilkan sebuah *output*. Perubahan dalam aset biologis terdiri dari proses pertumbuhan, penambahan, produksi, dan penghasilan yang menyebabkan terjadinya perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru berupa produk agrikultur atau berupa tambahan aset biologis lainnya dalam tingkatan yang sama. Perubahan yang terjadi pada aset biologis memerlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar (Ridwan, 2011).

Pengukuran, pengakuan dan penyajian nilai dari suatu aset biologis memerlukan pemahaman yang sangat mendetil sehingga entitas pelaporan diwajibkan untuk menggunakan metode akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan yang tepat agar nilai dari aset tersebut dapat disajikan secara wajar (Farida, 2012). Apabila entitas pelaporan telah memilih metode akuntansi dan standar yang tepat, maka laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat lebih baik lagi bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Entitas pemerintah yang mengelola aset berupa hewan dan tanaman juga wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Seperti entitas pelaporan pemerintah pada umumnya standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan amanat dari PP No. 71 Tahun 2010. Terkait dengan pengelolaan aset biologis dalam entitas pemerintah, SAP tidak memunculkan aturan yang spesifik yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pengelolaan aset biologis. Namun demikian, pengelolaan aset biologis dalam SAP

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Akuntansi Aset Tetap yang menggolongkan aset biologis kedalam kategori aset tetap lainnya. Disamping PSAP 07 yang menyatakan aset biologis kedalam golongan aset tetap lain. Aset biologis juga diatur di dalam PSAP 05 dan menggolongkannya kedalam kategori persediaan.

Kedua pernyataan standar akuntansi pemerintahan diatas dapat digunakan oleh entitas pelaporan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang andal. Keandalan laporan keuangan biasanya diperoleh dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan pada harga perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila terdapat bukti transaksi yang menunjukkan pertukaran suatu aset yang menunjukkan besarnya biaya untuk memperoleh aset tersebut. Bila suatu aset tetap diperoleh tanpa nilai nominal maka nilai dari aset dihitung sebesar nilai wajar pada saat diperoleh. Manajemen entitas pelaporan juga harus menyesuaikan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan sesuai dengan fungsi dari aset biologis itu sendiri. Apabila aset biologis diakui sebagai persediaan maka aset dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Kemampuan entitas pelaporan untuk memilih metode penilaian yang sesuai akan berdampak pada informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang di susun. Sehingga informasi yang dihasilkan tidak bias dan menunjukkan nilai dari aset yang sebenarnya (Kurniawan, 2012).

Salah satu entitas akuntansi pemerintah yang mengelola aset biologis adalah Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Dinas Perikanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten dibidang perikanan. Keberadaan aset biologis dalam Dinas Perikanan Kabupaten Jember ini menjadi sangat unik dan krusial karena termasuk kedalam kegiatan utama entitas. Kemudian permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara entitas melakukan proses pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian terhadap aset biologis tersebut. Hal ini dikarenakan aset biologis akan terus mengalami perubahan selama masa ekonomisnya.

Penelitian ini mengambil contoh dari laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang akan digunakan sebagai media untuk menjelaskan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAP 05 dan PSAP 07. Dengan demikian apabila peneliti menemukan ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia maka akan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset biologis. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menampilkan tabel yang menunjukkan perbedaan dari masing-masing pernyataan dalam standar tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi dan pencatatan transaksi terhadap aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAP 05 dan PSAP 07?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis yang selama ini telah diterapkan dalam pencatatan transaksi aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan sudut pandang PSAP 05 dan PSAP 07.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan literatur penelitian selanjutnya untuk menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan aset biologis yang dikelola oleh entitas pemerintah di Indonesia. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil topik pembahasan seputar aset biologis yang dikelola pemerintah, karena sejauh ini tidak banyak penelitian yang dilakukan terhadap aset biologis pemerintahan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perkuliahan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah referensi penelitian yang berkaitan dengan aset biologis pemerintahan yang tidak hanya terbatas pada studi empiris.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi entitas pemerintah yang sejenis dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam menyajikan, mengukur, menilai, dan melaporkan aset biologis yang dikelola sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki banyak pengertian. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan sebuah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja dari suatu entitas. Sekilas laporan keuangan pemerintah tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan entitas bisnis. Namun, yang membedakan adalah tujuan penggunaan laporan keuangan tersebut. Menurut Deddy Nordiawan, dkk (2006: 151) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Dalam entitas pemerintah komponen laporan keuangan pokok seperti yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 (2010:28) harus terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok seperti yang telah di jelaskan dalam paragraf 28 diatas, entitas pelaporan juga wajib untuk menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory*

*reports*). Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

Tujuan laporan keuangan pemerintah memang berbeda dengan tujuan laporan keuangan dari perusahaan berbasis bisnis. Karena bagi perusahaan bisnis, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan atas sumberdaya yang mereka kelola dengan maksud sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ini biasanya berupa pertimbangan untuk menjual investasi.

## **2.2 Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang terdapat dalam laporan

keuangan pemerintahan tidak jauh berbeda dengan neraca yang dibuat oleh entitas bisnis. Unsur-unsur neraca meliputi:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh entitas pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi di masa depan dapat diperoleh. Termasuk di dalamnya sumber daya nonkeuangan yang diperlukan sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang timbul akibat utang yang terjadi di masa lalu.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya kedalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

### **2.3 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan mungkin saja dapat terjadi. Hal ini dikarenakan perbedaan persepsi antara pembaca dan isi dari laporan keuangan

tersebut. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Faktor lainnya dapat pula disebabkan karena pembaca terbiasa melihat laporan keuangan sektor komersial sehingga pembaca cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, Catatan atas Laporan Keuangan diperlukan sebagai penjelas secara naratif, analisis atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang baik.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## 2.4 Persediaan

### 2.4.1. Definisi Persediaan

Dalam PSAP No. 5 paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada modul Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Erlina dkk, 2015: 217) suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan ketika suatu aset tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang mana termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pertanian, misalnya hewan atau tanaman.

PSAP No. 5 Paragraf 10 PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan kelompok persediaan sebagai berikut:

- a. Barang konsumsi
- b. Amunisi
- c. Barang untuk pemeliharaan

- d. Suku cadang
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
- f. Pita cukai dan leges
- g. Bahan baku
- h. Barang dalam proses/setengah jadi
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- j. Hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi atau tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, barang-barang yang telah disebutkan diatas diakui sebagai persediaan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAP No. 5 Paragraf 11 dan 13)

#### **2.4.2. Pengakuan Persediaan**

Pengakuan merupakan pencatatan suatu item dalam akuntansi yang selanjutnya akan disajikan dalam laporan keuangan. PSAP No. 5 PP No. 71 Tahun 2010 mengatur bahwa persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Menurut Erlina dkk, 2015: 219 pencatatan persediaan basis akrual dilakukan dengan:

- a. Metode perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu diperbarui.

- b. Metode periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit untuk diidentifikasi. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik tersebut dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang berada di gudang maupun yang sudah ada pada unit pemakai. Oleh sebab itu perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui seberapa besar beban persediaan untuk periode yang bersangkutan. Persediaan dalam kondisi rusak tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan rusak atau usang.

#### **2.4.3. Pengukuran dan Penilaian Persediaan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Persediaan dicatat sebesar jumlah uang yang menjadi nilai dari persediaan tersebut. Jumlah uang tersebut menunjukkan biaya yang dapat diukur secara andal atas perolehan/kepemilikan persediaan (Sumini, 2014).

Berdasarkan PSAP No. 5 PP No. 71 Tahun 2010, persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan berupa hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pada akhir periode, apabila terdapat sisa persediaan, metode yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan akhir tersebut adalah metode *First In First Out* (FIFO) dan metode harga pembelian terakhir. Metode FIFO digunakan untuk jenis persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda, sedangkan harga pembelian terakhir digunakan untuk persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, seperti barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku dan barang dalam proses/setengah jadi (Sumini, 2014).

#### **2.4.4. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan**

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil *opname* fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk persediaan, mengungkapkan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang juga dituangkan dalam CaLK (Sumini, 2014).

## 2.5 Aset

### 2.5.1. Definisi dan Karakteristik Aset

Aset merupakan salah satu elemen dalam laporan posisi keuangan entitas yang menampilkan sisi sumberdaya yang dimiliki oleh entitas dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas tersebut. Dalam organisasi sektor publik aset memiliki peranan yang penting karena mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Aset dalam organisasi sektor publik dapat diperoleh dengan cara pembelian, pertukaran, hibah atau pembangunan. Selanjutnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan aset tetap dijelaskan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimiliki meskipun aset tersebut digunakan oleh pihak lain. Dalam kasus lain, ketika aset tetap dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk kedalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap diatas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik beberapa karakteristik utama agar suatu objek dapat disebut sebagai aset (Suwardjono, 2006:255), yaitu:

#### a. Manfaat Ekonomik

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena daya belinya atau daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomik karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban.

#### b. Dikuasai oleh entitas

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu pos atau objek tidak harus dimiliki oleh entitas tapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh karena itu, konsep penguasaan lebih penting daripada konsep pemilikan. Penguasaan disini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara/menahan, menukarkan, menggunakan mafaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut.

c. Merupakan hasil dari transaksi entitas di masa lalu.

Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama pengakuan objek sebagai aset tetapi tidak cukup untuk mengakui aset secara resmi dalam sistem pembukuan. Aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomik.

### **2.5.2. Klasifikasi Aset**

Secara umum klasifikasi aset pada neraca dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam entitas pemerintahan aset tetap seringkali merupakan bagian yang paling utama karena signifikan penyajiannya dalam neraca. Aset tetap di kelompokkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah yang tidak memenuhi definisi dari aset tetap harus disajikan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset yang termasuk ke dalam golongan aset tetap

lainnya adalah hewan dan tanaman yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut sebagai aset biologis.

### **2.5.3. Pengakuan Aset**

Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Disamping memenuhi definisi aset, kriteria keterukuran, keterpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Dalam PSAP No. 07 Paragraf 15-19 PP No. 71 Tahun 2010 telah dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pemerintah juga mengakui suatu aset pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak

eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

#### **2.5.4. Pengukuran dan Penilaian Aset**

Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan suatu makna tertentu dari objek tersebut. Objek dapat berupa barang, jasa, binatang, tubuh manusia, dan benda atau konstruksi lainnya. Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian bergantung pada makna yang ingin direpresntasikan melalui pos statemen keuangan. Ada berbagai dasar yang dapat digunakan dalam menilai suatu aset. Berbagai dasar pengukuran tersebut antara lain adalah:

- a. Biaya historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut saat perolehan.

b. Biaya kini (*current cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.

c. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).

d. Nilai sekarang (*present value*)

Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil pelaksanaan usaha normal.

e. Nilai wajar (*fair value*)

Nilai aset dan kewajiban yang dapat berubah sesuai kewajarannya pada pasar saat transaksi dilakukan atau neraca disiapkan.

Berdasarkan PSAP No. 07 Paragraf 20, 27 dan 28 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kosntruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai

satuan minimum kapitalisasi maka aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLK. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan/, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan jenisnya ditetapkan oleh kepala daerah (Erilina dkk, 2015:250).

#### **2.5.5. Penyajian dan Pengungkapan Aset**

PSAP No. 07 PP No. 71 Tahun 2010 mensyaratkan laporan keuangan untuk mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan;
  2. Pelepasan;
  3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  1. Nilai penyusutan;
  2. Metode penyusutan yang digunakan;
  3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Selain itu laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat jenis aset tetap.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

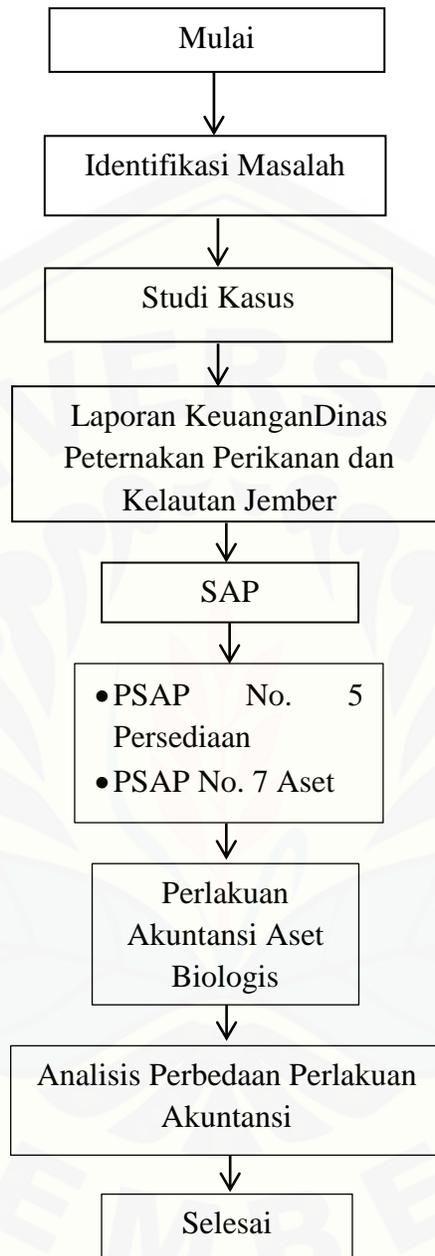
Penelitian Ekawati (2016) yang berjudul “Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Malang)” menyatakan bahwa aset biologis diakui pada saat perolehan berdasarkan nilai historis, tidak dilakukan penilaian kembali terhadap aset biologis pada akhir periode. Sehingga nilai aset biologis yang dilaporkan tetap sebesar harga perolehan pada saat pembelian. Aset biologis dilaporkan pada neraca konsolidasian pemerintah Kabupaten Malang yang dikasifikasikan sebagai aset tetap lainnya dan dilaporkan bersama dengan tumbuhan, hewan, barang bercorak kebudayaan dan buku perpustakaan sebesar nilai konsolidasi dari aset tersebut. Namun, tidak ada klasifikasi secara khusus untuk perlakuan aset biologis padahal aset biologis memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan aset tetap lainnya. Hasil temuan yang diperoleh peneliti setelah membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAP 07, IPSAS 27 dan P3LKPP Industri Peternakan menunjukkan perbedaan. Perbedaan yang terlihat pada pengakuan aset biologis berdasarkan IPSAS 27 dan P3LKPP aset biologis diakui pada saat perolehan dan saat terjadi penambahan. Sedangkan pada PSAP 07, IPSAS 27 dan P3LKPP industri peternakan aset biologis harus dinilai pada akhir periode. Sedangkan untuk pelaporan aset

biologis dilaporkan pada neraca yang diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar sebagai hewan ternak dalam pertumbuhan dan hewan ternak telah produksi, serta dibutuhkan rekonsiliasi pada CaLK.

Penelitian Mufliha (2013) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada UPT Unit Pengelola Budidaya Laut) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur” menyatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi untuk aset biologis berdasarkan pada IPSAS 27 dan SAP yang berlaku di Indonesia. IPSAS 27 mensyaratkan pengukuran aset biologis berdasarkan pada nilai wajar sedangkan SAP masih memasukkan aset biologis kedalam persediaan dan mensyaratkan pengukuran dengan biaya perolehan.

## **2.7 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana tahapan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset biologis pada laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia kemudian membandingkannya dengan perlakuan akuntansi aset biologis yang didasarkan pada *International Public Sector Accounting Standar (IPSAS) Agriculture*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan yang terjadi akibat perbedaan perlakuan pada aset biologis terutama pada metode pengukuran yang digunakan. Adapun kerangka pemecahan masalah dalam studi ini digambarkan sebagai berikut:



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Indriantoro dan Supomo, 2011:12). Bodgan dan Taylor (Moeloeng, 2007:3) juga mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berusaha menjelaskan gambaran pelaporan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang berfokus pada proses pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset biologis, menilai kesesuaian perlakuan aset tersebut dengan peraturan akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan membandingkannya dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku internasional (IPSAS 27).

Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari Bapak Edi Iswanto selaku Kasubag Keuangan, Pelaporan dan Perencanaan, Bapak Karsam Budi Siswoyo dan Bapak Abdillah sebagai pengelola balai benih ikan, serta Ibu Diyah Setyowati sebagai staff bagian budidaya. Data primer dapat berupa opini orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Terdapat dua macam cara untuk memperoleh data primer yaitu dengan metode survei dan metode observasi.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait perlakuan akuntansi aset biologis. Data yang diperoleh dapat berupa buku, artikel, jurnal, serta catatan lain yang berkaitan dengan aset biologis.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai media untuk mengumpulkan data.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden. Menurut Sarosa (2012:46) ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan berdasarkan tingkat formalitas dan terstrukturanya wawancara tersebut yaitu: (1) wawancara terstruktur, yang menggunakan kuisisioner yang sudah disusun sebelumnya sehingga memiliki standar yang sama dan dilakukan dengan menanyakan daftar pertanyaan dalam kuisisioner (bahkan biasanya sudah disertakan jawabannya). (2) wawancara tidak terstruktur, wawancara jenis ini bersifat informal karena tidak menggunakan pedoman. Partisipan memiliki kebebasan yang luas untuk memberikan tanggapan tentang topik wawancara, namun tidak menyimpang dari topik wawancara yang dibahas. (3) wawancara semi terstruktur, dalam wawancara jenis ini pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk digunakan sebagai pedoman sebelum kegiatan wawancara dilakukan. Pewawancara perlu menelusuri lebih lanjut jawaban dari partisipan, sehingga harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan.

Berdasarkan kebutuhan penelitian, jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam sesuai dengan pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. Informan dalam penelitian ini adalah pekerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang meliputi Kepala Sub Bagian

Keuangan, Pengelolaan dan Perencanaan, Pengelola Balai Benih ikan, dan Staff Bagian Budidaya.

b. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara untuk pengumpulan data, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Metode ini relatif mudah untuk dilaksanakan karena sifat sumber datanya yang tetap. Semakin majunya teknologi juga sangat membantu penulis dalam pengumpulan data. Segala informasi terkait topik penelitian dapat diakses dengan mudah melalui internet. Penggunaan metode ini tentu sangat memudahkan peneliti karena menunjang keefektifan dan keefisienan penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang terkait dengan pencatatan aset biologis yang meliputi Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas.

c. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh dengan menggunakan teknik observasi yang melakukan pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. (1) observasi langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan kerja sehari-hari Dinas Perikanan Kabupaten Jember terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset biologis. (2) observasi tidak langsung yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pencatatan aset biologis pada laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses memaknai sekumpulan data agar dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses yang rumit karena tidak ada pedoman yang pasti untuk menganalisis data yang diperoleh melalui proses wawancara. Sehingga

peneliti harus mampu mengolah data yang didapat dari Informan agar menjadi informasi yang berkualitas dan mudah dipahami bagi pembacanya.

Analisis data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah peneliti seharusnya melakukan reduksi data yaitu dengan memilah informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan ini dilakukan karena data yang didapat mungkin terlalu banyak dan kurang sesuai dengan rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan jelas.

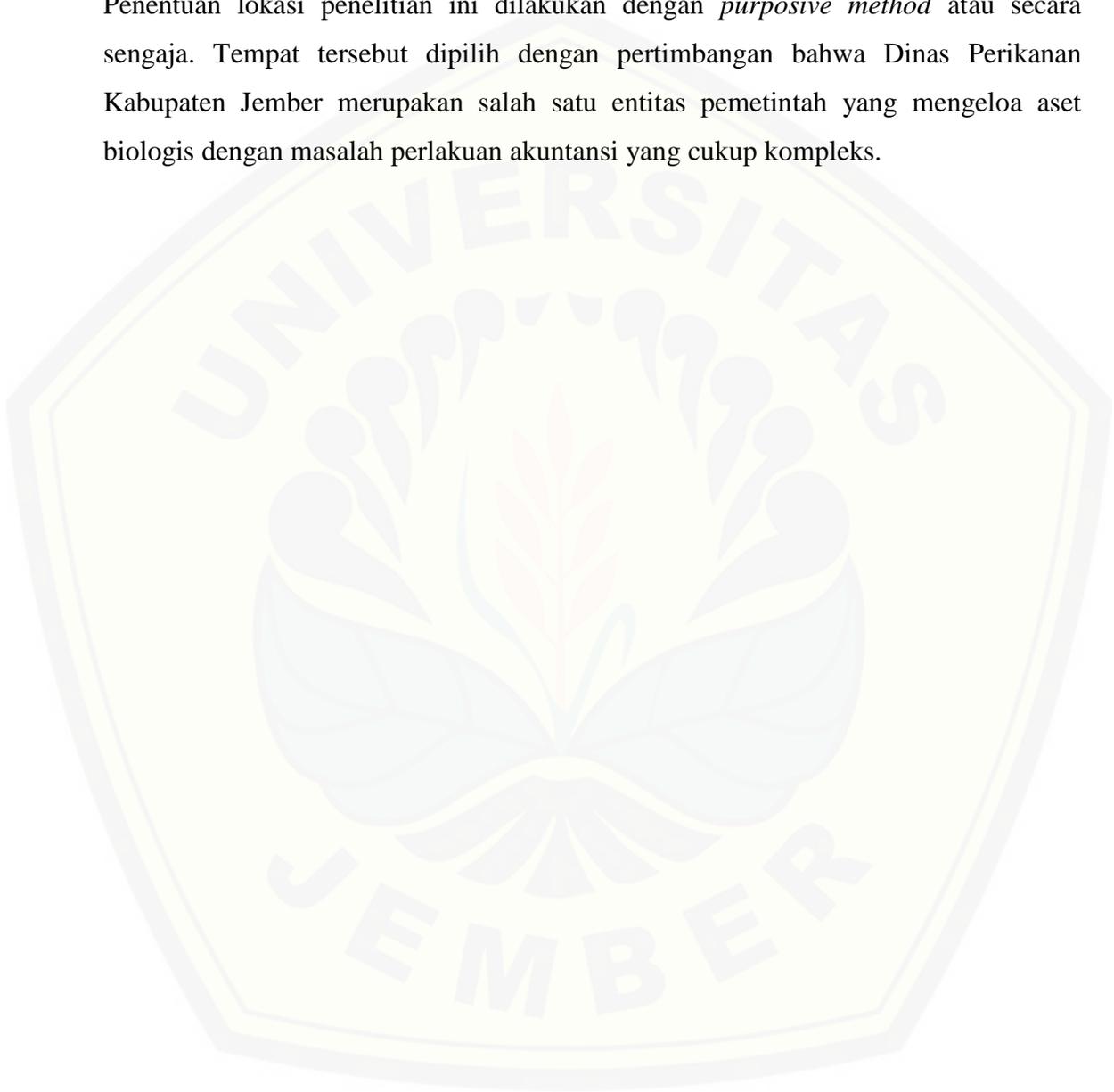
### **3.4 Uji Keabsahan Data**

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Dalam studi ini keabsahan data yang diperoleh peneliti akan diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:178). Selanjutnya untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh peneliti maka dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara, misalnya peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dari informan.
- b. Membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan yang lain. Tujuannya adalah agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan tersebut adalah data yang benar.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumentasi yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset biologis dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan.

### 3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan *purposive method* atau secara sengaja. Tempat tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Jember merupakan salah satu entitas pemetintah yang mengelola aset biologis dengan masalah perlakuan akuntansi yang cukup kompleks.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan Kabupaten Jember mengakui aset biologis berupa ikan indukan sebagai aset tetap lain-lain pada saat manfaat ekonomis diharapkan dapat diterima oleh entitas sebesar harga perolehannya. Pengakuan aset biologis sebagai aset tetap lain-lain ini telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku yaitu SAP 07 yang mengatur tentang aset tetap.
- b. Dinas Perikanan Kabupaten Jember tidak melakukan pengakuan saat perolehan terhadap bibit ikan hasil budidaya yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagai aset atau persediaan. Berbeda dengan PSAP 05 yang mensyaratkan pengakuan aset saat perolehan sebagai persediaan yang diukur berdasarkan nilai wajarnya.
- c. Aset biologis Dinas Perikanan Kabupaten Jember tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan penghapusan pada saat aset tersebut tidak dapat digunakan atau mati hal ini sesuai dengan PSAP 07.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ditemukan terkait penelitian ini adalah:

- a. Hasil dari wawancara ini lebih mengarah pada pembahasan Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Indonesia belum memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan yang khusus mengatur tentang Aset Biologis, sehingga hasil penelitian ini belum bisa memberikan rekomendasi perbaikan mengenai perlakuan akuntansi aset

biologis yang dikelola oleh pemerintah dengan metode penilaian berdasarkan nilai wajar agar menunjukkan nilai aset yang relevan berkaitan dengan transformasi biologis yang dialami oleh aset.

- c. Penelitian ini hanya mampu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi aset biologis berupa hewan yang dikelola oleh entitas pemerintah.
- d. Penelitian ini belum dapat menunjukkan laporan keuangan dinas secara keseluruhan terkait pelaporan aset biologis karena termasuk kedalam rahasia dinas.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan selama penelitian berlangsung, berikut ini adalah saran yang peneliti berikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya terkait dengan topik bahasan yang sama:

- a. Peneliti selanjutnya harus menyajikan hasil wawancara yang lebih mengarah pada pembahasan Laporan Operasional karena pendapatan dan beban terkait pengakuan aset biologis tersaji dalam Laporan Operasional.
- b. Dewan pembuat standar akuntansi pemerintahan sebaiknya melakukan pertimbangan agar menyusun standar khusus mengenai perlakuan akuntansi aset biologis. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan pengakuan dan metode pengukuran yang diatur dalam SAP agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat memberikan kualitas informasi yang baik kepada para pemangku kepentingan.
- c. Peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran perlakuan akuntansi pada tanaman yang dikelola oleh entitas pemerintah, sehingga mampu melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
- d. Peneliti selanjutnya dapat menyajikan laporan keuangan dari objek penelitian secara keseluruhan.

**Daftar Pustaka**

- Alfasyiri, Mohamad Ridwan. 2016. *Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Heritage Asset) Candi Penataran Blitar: Sebuah Studi Fenomenologi*. Skripsi ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Anggraini, Fauziah Galuh. 2014. *Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)*. Skripsi ; Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Agustini, Aisa Tri. 2011. *Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur)*. Skripsi ; Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Auliana. 2014. *Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Pernyataan Satandar Akuntansi Pemerintahan No. 07*. Skripsi ; Fakultas Ekonomi Universitas Raja Ali Haji
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Accounting Theory*. Jakarta. Salemba Empat
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. FPTK IKIP Veteran Semarang
- Dwiputra, Arga Jaya, Dkk. *Aset Biologis dan Aset Bersejarah: Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Ekawati, Yunita Kurnia. 2016. *Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Malang)*. Skripsi ; Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta. Salemba Empat
- Farida, Ike. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan International Accounting Standard 41 pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)*. Skripsi ; universitas Negeri Surabaya
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. BPF

- International Public Sector Accounting Standard*. 2011. Nomor 27: *Agriculture*
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. 2014. *Intermediate Accounting*. 15th Edition. New York: John Willey & Sons, Inc
- Kurniawan, Rendra. 2012. *Valuasi Aset Biologis: Kajian atas IAS 41 Mengenai Akuntansi Pertanian*. Skripsi ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Miles, B. B., dan A. M Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Noerdiawan, Deddy, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. Nomor 01: *Penyajian Laporan Keuangan*
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. Nomor 05: *Persediaan*
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah, 2010. Nomor 07: *Aset Tetap*
- Ridwan, Achmad. 2011. *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)*. *Jurnal Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Jakarta. Indeks
- Sumini. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua (KABA) untuk Persediaan*. [www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id) diakses pada Sabtu, 4 Februari 2017
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta. BPF
- Undang-undang Republik Indonesia, 2004. Nomor 01: *Perbendaharaan Negara*
- Wildaty, Mufliha. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada UPT Unit Pengelola Budidaya Laut) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi ; Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

## Lampiran 1

### Daftar Pertanyaan

#### Bagian Keuangan

1. Apakah anda mengetahui apa itu aset biologis?
2. Apakah anda mengetahui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang aset biologis?
3. Apa standar akuntansi yang selama ini digunakan sebagai acuan pencatatan untuk aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis dimulai dari proses pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyajian dan pengungkapan aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember?
5. Akah menurut anda perlakuan akuntansi untuk aset biologis yang diterapkan oleh dinas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berkaitan dengan aset biologis?
6. Apakah anda mengetahui standar akuntansi internasional yang mengatur tentang aset biologis (IPSAS 27)?
7. Menurut anda standar mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset biologis?

#### Pengelola Balai Benih Ikan

1. Apakah anda megetahui apa itu aset biologis?
2. Apa saja aset biologis yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember?
3. Apa saja kegiatan Dinas Perikanan yang melibatkan aset biologis?
4. Aapakah Balai Benih Ikan melakukan pencatatan khusus untuk aset biologis yang dikelola?

5. Apa saja laporan yang dibuat?
6. Berapa masa manfaat untuk masing-masing aset biologis?
7. Bagaimana pengelompokan ikan-ikan yang dikelola selain berdasarkan dari jenisnya?

#### **Bagian Budidaya**

1. Apakah anda mengetahui apa itu aset biologis?
2. Apasaja kegiatan Dinas Perikanan yang berkaitan dengan aset biologis?
3. Apakah makanan berbahan dasar ikan adalah hasil produksi dari dinas ini?
4. Apakah ada pengelompokan untuk aset biologis yang termasuk kedalam kategori *bearer* dan *consumeable*?

**Lampiran 2****Hasil Wawancara**

Narasumber : Edi Iswanto

Jabatan : Kasubag. Keuangan, Pelaporan dan Perencanaan

Waktu : 27 April 2017

Lokasi : Dinas Perikanan Kabupaten Jember

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda mengetahui apa itu aset biologis?	Iya. Aset biologis itu berupa makhluk hidup contohnya ya ikan, manusia juga termasuk aset biologis.
2	Apakah anda mengetahui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang aset biologis?	Yang pasti pedoman pelaporan laporan keuangan pemerintahan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sekarang. Aturannya ya sama kayak PEMDA mbak. Kita ini kan entitas akuntansi jadi mengikuti. Karena kita masih mengakui aset itu (aset biologis) sebesar nilai perolehannya saya rasa masuk aturan aset tetap.
3	Apa standar akuntansi yang selama ini digunakan sebagai acuan pencatatan untuk aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten	Ya itu tadi karena aset itu kita masih akui sebesar harga perolehannya saya rasa masih pakai aturan aset tetap.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Jember?	
4	<p>Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis dimulai dari proses pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyajian dan pengungkapan aset biologis pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember?</p>	<p><b>Pengakuan :</b> Kita mengakui aset tersebut sebagai aset tetap lain-lain pada saat diperoleh yang dibeli murni dari uang yang kita keluarkan.</p> <p><b>Pengukuran dan Penilaian:</b> Kita menggunakan dasar biaya perolehan. Sesuai dengan jumlah uang yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Kalau anak ikan karena kita tidak membeli jadi tidak dilakukan penilaian berdasarkan harga perolehan, tapi pada waktu menjual kita menentukan dengan menggunakan harga yang ada di pasar. Kemudian untuk penyusutannya kita hanya mengurangi jumlah aset yang kita miliki ketika indukan ikan tersebut mati.</p> <p><b>Penyajian dan Pengungkapan:</b> Kita menyajikan ikan-ikan tersebut kedalam neraca sebagai aset tetap lain-lain. Aset lain-lain itupun campur ada aset-aset yang rusak, ada juga aset yang tak bertuan. Jadi dulu sebenarnya aset-aset biologis itu</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>masuk sebagai belanja barang, bukan modal. Karena suatu hal aset tersebut dimasukkan kedalam belanja modal yang notabeneanya kalau sudah masuk belanja modal diharuskan dicatat sebagai aset. Padahal seharusnya dicatat sebagai persediaan karena aset biologis itu bukan aset yang bisa disusutkan. Makanya sampai sekarang juga masih tidak jelas mau dicatat sebagai apa jadinya masih diakui sebagai aset lain-lain. Yang dicatat sebagai persediaan itu pakannya ikan. Kalau hasil dari penjualan benih ikannya kita sajikan dalam laporan operasional sebagai pendapatan lain-lain yang sah.</p>
5	Apakah ada pengelompokan untuk kategori aset biologis <i>consumable</i> dan <i>bearer</i> ?	Ya tidak ada. Kan kita bukan industri. Jadi nggak mungkin ada yang dijual untuk konsumsi. Jenis ikan yang sudah jadi indukanpun nanti kita jual dan dilaporkan sebagai pendapatan asli daerah.
6	Apakah menurut anda perlakuan akuntansi untuk aset biologis yang diterapkan oleh dinas telah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah yang berkaitan dengan	Seharusnya sudah sesuai.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	aset biologis?	
7	Apakah anda mengetahui standar akuntansi internasional yang mengatur tentang aset biologis (IPSAS 27)?	Saya cuma pernah dengar IPSAS saja. Untuk lebih jelasnya saya masih belum pernah membuka ataupun membaca karena implementasinya disini juga tidak ada. Jadi untuk standar perlakuan akuntansi aset biologis seperti yang mbaknya bilang tadi itu saya masih belum tau.
8	Menurut anda standar mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset biologis?	Setelah mendengar penjelasan dari mbaknya tadi menurut saya lebih enak kalau ada aturannya sendiri, aturannya lebih di khususkan. Karena kalau mau disebut aset juga kurang cocok, kan sifatnya cenderung tetap. Karakteristiknya juga beda dia itu kan sangat unik. Lagipula aset biologis ini kecenderungan untuk berubahnya sangat tinggi.

**Lanjutan Lampiran 2****Hasil Wawancara**

Narasumber : Karsam Budi Siswoyo

Jabatan : Pengelola Balai Benih Ikan

Waktu : 17 April 2017

Lokasi : Balai Benih Ikan Rambigundam

Narasumber : Abdillah

Jabatan : Pengelola Balai Benih Ikan

Waktu : 17 April 2017

Lokasi : Balai Benih Ikan Kalisat

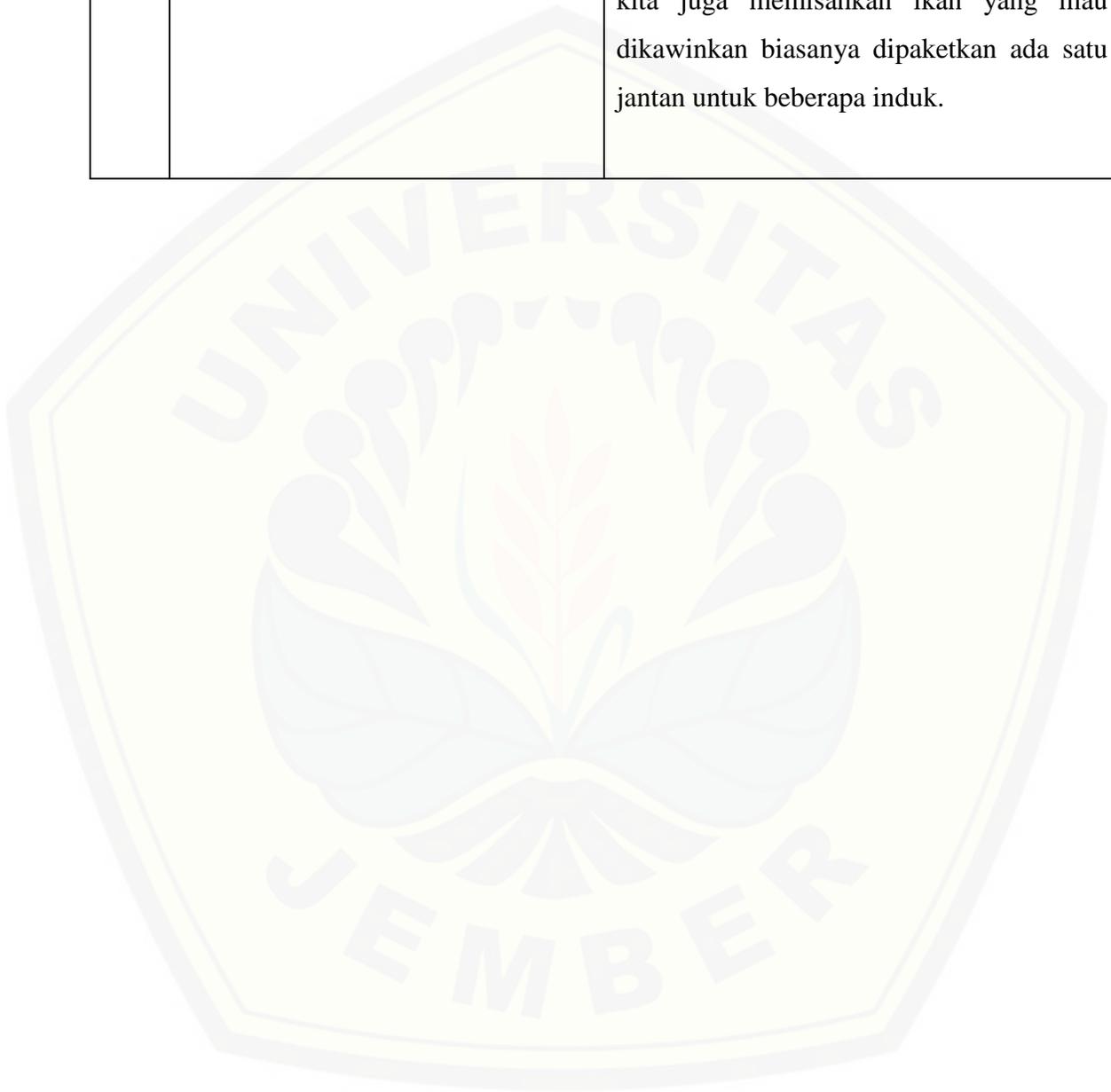
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda megetahui apa itu aset biologis?	<p><b>Bapak Karsam:</b> Saya nggak tau. Mungkin ikan. Tapi biasanya ikan itu kita sebut inventaris.</p> <p><b>Bapak Abdillah:</b> Nggak tau mbak.</p>
2	Apa saja aset biologis yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember?	<p><b>Bapak Karsam:</b> Ada Ikan Nila, Lele, Gurami, Tombro, Tawes. Ikan hias jenis Koi juga biasanya ada tapi untuk saat ini masih belum produksi kita.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<b>Bapak Abdillah:</b> Lele, Koi, Nila, Tawes, Tombro
3	Apa saja kegiatan yang dilakukan di Balai Benih Ikan ini?	<p><b>Bapak Karsam:</b> Kegiatan kita ya beli pakan baik untuk indukan ataupun anakan. Yang kedua mengawinkan biar jadi bibit ikan. Yang ketiga proses pemeliharaan yang meliputi kegiatan mengontrol air dan kolam mungkin ada yang bocor, kemudian mengecek kalau ikannya ada penyakitnya. Yang terakhir proses panen ikan kalau ada orang yang beli.</p> <p><b>Bapak Abdillah:</b> Secara prinsip karena kita ini Balai Benih Ikan kegiatan yang kita lakukan adalah pembenihan ikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kalau berbicara pemeliharaan ya macam-macam. Ada pemeliharaan induk, kemudian seleksi induk yang siap untuk dikawinkan, terus pemijahan itu sendiri, setelah itu penetasan telur, lalu aktifitas pemeliharaan larva (ikan yang baru menetas), yang terakhir penjualan benih ikan.</p>
4	Apakah Balai Benih Ikan melakukan pencatatan khusus untuk aset biologis yang dikelola?	<b>Bapak Karsam:</b> Ya kita buat laporan ikan yang sudah terjual di akhir periode. Bentuknya laporan produksi benih. Kita

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>nggak buat catatan berapa jumlah ikan yang masih ada di kolam. Hanya saja nanti pada akhir periode ada beberapa ikan yang tersisa itu dimasukkan laporan selanjutnya. Yang di catatat ya hanya yang terjual. Ikan induk yang mati juga nggak dicatat.</p> <p><b>Bapak Abdillah:</b> Kita tidak mencatat untuk benih, sebenarnya ini yang perlu kita jadikan bahan evaluasi buat penanganan induk sebelum di dederkan. Kita juga tidak melakukan perhitungan karena asumsinya benih yang kita laporkan adalah benih yang di jual. Jadi laporannya sebatas aset yang di jual yang masih hidup nggak di tulis. Tentunya waktu memindahkan ikan kita juga mempertimbangkan daya tampung dari kolam itu Cuma perhitungan jumlah itu pada saat ikan itu diangkat lagi untuk di jual. Rasanya percuma juga kalau nebar di hitung di jual juga dihitung lagi.</p>
5	Apa saja laporan yang dibuat?	<p><b>Bapak Karsam:</b> Kita buat laporan penjualan harian, setelah itu nanti di rekap jadi laporan produksi benih tiap akhir tahun. Selain itu ada juga laporan rincian mutasi stok indukan.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p><b>Bapak Abdillah:</b> Laporan harian ada, laporan produksi juga ada.</p>
6	<p>Berapa masa manfaat untuk masing-masing aset biologis?</p>	<p><b>Bapak Karsam:</b> Kalau ikan indukan usia produktifnya sampai empat tahun biasanya. Itu rata-rata untuk semua jenis. Kalau anakan biasanya usia satu bulan sudah terjual.</p> <p><b>Bapak Abdillah:</b> Umur ikan kalau sudah afkir itu biasanya lima tahun. Biasanya kalau ikan-ikan bersisik seperti Koi itu paling pendek 1-1,5 tahun, paling lama 4-5 tahun. Kalau ikan Lele biasanya umur 8 bulan itu sudah bisa bertelur. Kalau ikan yang bersisik seperti Koi dan Tombro itu paling tidak umur 1-1,5 tahun. Kalau nila sudah bisa beranak umur 3-4 bulan.</p>
7	<p>Bagaimana pengelompokan ikan-ikan yang dikelola selain berdasarkan dari jenisnya?</p>	<p><b>Bapak Karsam:</b> Ikannya dikelompokkan berdasarkan umurnya. Dari yang baru menetas sampai usia sekian bulan kita taruh di kolam yang berbeda. Nanti ikan yang mau dikawinkan juga ada tempatnya sendiri.</p> <p><b>Bapak Abdillah:</b> Kita kelompokkan berdasarkan umur dan ukuran. Selain itu</p>

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
		kita juga memisahkan ikan yang mau dikawinkan biasanya dipaketkan ada satu jantan untuk beberapa induk.



**Lanjutan Lampiran 2****Hasil Wawancara dengan Bagian Budidaya**

Narasumber : Diyah Setyowati

Jabatan : Staff Bagian Budidaya

Waktu : 17 April 2017

Lokasi : Dinas Perikanan Kabupaten Jember

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah anda mengetahui apa itu aset biologis?	Kita biasanya menyebut dengan komoditas ya mbak. Kalau biologis itu biasanya cenderung ke manusia.
2	Apasaja kegiatan Dinas Perikanan yang berkaitan dengan aset biologis?	Di balai benih ikan ya kita menangkarkan dan mengembangbiakkan ikan untuk dijual. Selain itu kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Kita juga menjual hasil produksi makanan berbahan dasar ikan dengan bermitra dengan kelompok-kelompok yang kami berdayakan.
3	Apakah makanan berbahan dasar ikan yang di jual merupakan hasil produksi dari dinas ini?	Tidak, itu merupakan hasil produksi dari masyarakat. Jadi kita ada kelompok yang memproduksi makanan tersendiri. Biasanya itu ikan dari kelompok kita yang harganya sedang turun di pasaran. Untuk

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		meningkatkan harga jual makanya diolah jadi bentuk makanan.
4	Apakah ada pengelompokan untuk aset biologis yang termasuk kedalam kategori <i>bearer</i> dan <i>consumeable</i> ?	Selain dikelompokkan berdasarkan jenis tentunya, biasanya cuma dikelompokkan berdasarkan umur dan ukurannya saja. Kalau ikan untuk konsumsi kita tidak menjual karena akan menyalahi tugas dan fungsi pokok dinas. Balai benih ya menjual benih ikan saja. Kalau makanan yang di depan itu ya dari hasil kelompok yang bermitra dengan kita, bukan kita yang mengolah.

## Lampiran 3

## Laporan Hasil Produksi Balai Benih Ikan Rambigundam Tahun 2016

No	Bulan	Produksi Benih Ikan (Ekor)					Jumlah
		Nilu	Lele	Gurami	Tombro	Tawes	
1	Januari	135.000	43.000	3.300	33.000	24.000	238.300
2	Februari	120.000	38.000	3.000	55.000	42.000	258.000
3	Maret	251.000	71.000	5.900	117.000	79.000	523.900
4	April	162.000	49.500	4.000	74.000	54.000	343.500
5	Mei	121.000	38.000	3.800	60.000	39.000	261.800
6	Juni	119.000	39.500	3.700	60.000	41.000	263.200
7	Juli	115.000	40.000	3.400	60.000	54.000	272.400
8	Agustus	142.000	49.000	4.000	60.000	36.000	291.000
9	September	127.000	40.000	4.100	43.000	32.000	246.100
10	Oktober	159.000	56.000	4.700	63.000	29.000	311.700
11	November	160.000	55.000	4.500	62.000	40.000	321.500
12	Desember	210.000	69.000	6.100	105.500	62.000	452.600
<b>JUMLAH</b>			588.000	50.500	792.500	532.000	3784.000

## Lampiran 4

## Rincian Mutasi Stock Indukan Di Balai Benih Ikan Rambigundam

No	Uraian	Persediaan Awal 2014				Pengeluaran			Persediaan Akhir 30 Juni 2014		
		Satuan	Volume	Harga	Jumlah	Volume	Harga	Jumlah	Volume	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6 (4x5)	10	11	12 (10x11)	13 (4+7-10)	14	15 (13x14)
1	Nila	Ekor	4.070	10.000	Rp 40.700.000	40	-	-	4030	10.000	Rp 40.300.000
2	Tombro	Ekor	628	50.000	Rp 31.400.000	25	-	-	603	50.000	Rp 30.150.000
3	Gurami	Ekor	37	100.000	Rp 3.700.000	-	-	-	37	100.000	Rp 3.700.000
4	Lele	Ekor	223	30.000	Rp 6.690.000	25	-	-	198	30.000	Rp 5.940.000
5	Tawes	Ekor	203	6.000	Rp 1.218.000	-	-	-	203	6.000	Rp 1.218.000
6	Patin	Ekor	125	30.000	Rp 3.750.000	-	-	-	125	30.000	Rp 3.750.000
<b>JUMLAH</b>			<b>5286</b>		<b>Rp 87.458.000</b>				<b>5.196</b>		<b>Rp 85.058.000</b>

**Lampiran 5**

Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Jember

**NERACA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Penerimaan	
Kas di Bendahara Pengeluaran	
Kas di BLUD	
Kas Lainnya	
Setara Kas	
Kas di Bendahara JKN	
Investasi Jangka Pendek	
Piutang Pendapatan	
Piutang Lainnya	
Penyisihan Piutang	
Beban Dibayar Dimuka	
Persediaan	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	
Investasi dalam Obligasi	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	
Dana Bergulir	
Deposito Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen Lainnya	
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Lainnya	
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Konstruksi dalam Pengerjaan	
Akumulasi Penyusutan	

**NERACA**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

URAIAN	JUMLAH
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	
Aset Lain-lain	
Aset yang Telah Dihilangkan	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang Piutang Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Bunga	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Pendaapatan Diterima Dimuka	
Utang Beban	
Utang Jangka Pendek Lainnya	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Utang dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Lainnya	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	
<b>EKUITAS</b>	
EKUITAS	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	

## Lampiran 6

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Jember

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### A. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca dan Laporan Operasional berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas dan Pendapatan-LO serta Beban-LO diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### B. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi asset dan atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Persediaan

Persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan dan dinilai dengan cara harga pembelian akhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga/nilai wajar atau estimasi nilai perolehan.

4. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Belanja pemeliharaan dan perbaikan yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau mengakibatkan peningkatan masa ekonomis di masa mendatang dikapitalisasikan ke nilai aktiva yang bersangkutan. Pengeluaran belanja tersebut dibebankan ke operasi pada periode berjalan. Aktiva yang sudah tidak dipergunakan lagi karena rusak dan aktiva yang telah berubah status hukumnya, baik karena dijual ataupun diserahkan kepada pihak lain, akan dihapus dari akun aktiva bersangkutan serta mengurangi nilai Ekuitas.

Aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan nilai pembayaran/SP2D yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal neraca.

Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, usang, hilang dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah :
  - a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*).
  - c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
  - d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.
  - e. Seluruh kekayaan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Jember.
  - f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan.
6. Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya.
7. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, menggunakan kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

## C. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

### 1. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan barang pakai habis, bahan atau perlengkapan (*supplies*), barang dalam proses produksi untuk dijual, barang yang disimpan untuk dijual.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki, dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.
- d. Pengakuan persediaan dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau niaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan atau pada akhir periode akuntansi, dan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- e. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar
- f. Khusus untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Daerah, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, pencatatan dengan metode perpetual, yaitu dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

## 2. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap terdiri dari:
  - (a) Tanah
  - (b) Peralatan dan Mesin
    - Alat-alat berat
    - Alat-alat angkutan
    - Alat bengkel
    - Alat pertanian dan peternakan
    - Alat kantor dan rumah tangga
    - Alat studio dan alat komunikasi
    - Alat ukur
    - Alat kedokteran
    - Alat laboratorium
    - Alat keamanan
  - (c) Gedung dan Bangunan:
    - Bangunan dan gedung
    - Bangunan monumen
  - (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
    - Jalan dan jembatan
    - Bangunan air (irigasi)
    - Instalasi
    - Jaringan
  - (e) Aset tetap lainnya:
    - Buku-buku perpustakaan
    - Barang bercorak seni dan budaya
    - Hewan ternak dan tanaman

- (f) Konstruksi dalam pengerjaan
- c. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  - d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - e. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan satu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan praproduksi serupa tidak merupakan bagian suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
  - f. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan samap dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
  - g. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  - h. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
  - i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

- j. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama manfaat aset yang bersangkutan.
- k. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- l. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus, dengan perkiraan masa manfaat untuk setiap aset sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan akuntansi.
- m. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik tersebut.
- n. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- o. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- p. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset, dengan nilai perolehannya, diikuti akumulasi penyusutan sehingga diketahui nilai buku aset tetap.

**Lampiran 6**Contoh Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan IPSAS 27 *Agriculture***Disclosure Requirements****Statement of Financial Position****Entity XYZ**

	December 31, 20X8 Currency Unit (CU)	December 31, 20X7 CU
<b>ASSETS</b>		
<b>Current assets</b>		
Cash	xxx	xxx
Receivables	xxx	xxx
Inventories	xxx	xxx
<b>Total Current Assets</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Non-current assets</b>		
Bearer biological assets		
Dairy livestock – immature	xxx	xxx
Dairy livestock – mature	xxx	xxx
Subtotal – bearer biological assets	xxx	xxx
Property, plant and equipment	xxx	xxx
<b>Total non-current assets</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Total assets</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>LIABILITIES</b>		
<b>Current liabilities</b>		
Payables	xxx	xxx
<b>Total current liabilities</b>	xxx	xxx
<b>NET ASSETS/EQUITY</b>		
Contributed capital	xxx	xxx
Accumulated surplus	xxx	xxx
<b>Total net assets/equity</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Total net assets/equity and liabilities</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**Lampiran 7**

Contoh Laporan Kinerja Keuangan menurut IPSAS 27

*Statement of Financial Performance***Entity XYZ**

	<b>December 31, 20X8</b>
	<b>CU</b>
Fair value of milk produced	xxx
Gains arising from changes in fair value less cost to sell of dairy livestock held for sale	xxx
	<b>xxx</b>
Inventories used	(xxx)
Staff costs	(xxx)
Depreciation expenses	(xxx)
Other operating expenses	(xxx)
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	<b>(xxx)</b>
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
<b>Surplus for the period</b>	<b>xxx</b>
	<hr style="width: 100%; border: 1.5px solid black;"/>

**Lampiran 8**

Contoh Laporan Perubahan Ekuitas menurut IPSAS 27

*Statement of Changes in Net Assets/Equity***Year ended December 31, 20X8**

	CU	CU	CU
	<b>Contributed capital</b>	<b>Accumulated surplus</b>	<b>Total</b>
Balance at January 1, 20X8	xxx	xxx	xxx
Surplus of the period	-	-	-
<b>Balance at December 21, 20X8</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>	<hr style="border-top: 3px double black;"/>	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

**Lampiran 9**

Contoh Laporan Arus Kas Menurut IPSAS 27

**Entity XYZ****Year ended****December 31, 20X8**

	<b>CU</b>
<b>Cash flows from operating activities</b>	
Cash receipts from sales of milk	xxx
Cash receipts from sales of livestock	xxx
Cash paid for supplies and to employees	(xxx)
Cash paid for purchases of livestock	(xxx)
<b>Net cash from operating activities</b>	<b>xxx</b>
<b>Cash flows from investing activities</b>	
Purchase of property, plant, and equipment	(xxx)
<b>Net cash used in investing activities</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Net increase in cash</b>	<b>(xxx)</b>
<b>Cash at beginning of the year</b>	<b>xxx</b>
<b>Cash at end of the year</b>	<b>xxx</b>